

Motivasi Amerika Serikat Menjatuhkan Embargo Ekonomi Terhadap Myanmar Tahun 2007

Mustavidy Anggara*, Tri Joko Waluyo**

Email: Vhidy5@gmail.com

Abstract

This study used qualitative research methods that the source data is taken from books, journals, newspapers, internet, and previous research has relevant data with the title. Perspectives and levels of analysis used in this study is that the state as the main actor. By using the theory of liberalism and foreign policy analysis, will describe the direction of the object of analysis. This study will explain the factors that led the United States impose economic embargoes against Myanmar. To find out how the domestic situation in Myanmar before and after the embargo dropped by United States. As well as to see the effects on the fall of the economic embargo. Myanmar in the value of the United States has violated the human rights of the people. Myanmar which is led by a military junta, is considered refusing to uphold democratic values. This study will answer how the United States seeks to enhance the role, as well as trying to meet the economic interests of Southeast Asia region. The United States seeks to indoctrinate values of liberalism, democracy, and human rights freedom of Southeast Asia region. If a country refuses it, then it will have a great opportunity to drop in the economic embargo as happened in Myanmar. This is the strategy of the United States foreign policy to meet national interests and enhance the role of Southeast Asia region.

Keywords: *Economic embargo, National interest*

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan bahasan mengenai motivasi Amerika Serikat menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Myanmar pada tahun 2007. Mengapa Amerika Serikat menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Myanmar. Bagaimana sanksi itu berjalan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam penjatuhan embargo ekonomi terhadap Myanmar pada tahun 2007, serta menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Myanmar dalam menghadapi embargo ekonomi Amerika Serikat tersebut. Kerangka teori yang digunakan dalam tulisan ini ialah teori liberalisme dan kebijakan luar negeri.

Pada 19 Agustus 2007, terjadi aksi unjuk rasa anti pemerintah junta militer di Myanmar. Dipimpin oleh para pelajar dan aktivis politik oposisi, aksi tersebut

* Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau

** Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau

ditangani dengan cepat oleh junta militer, dengan menahan para pengunjuk rasa. Pada 24 September 2007, aksi unjuk rasa kembali pecah di ibukota Myanmar, Yangon. Dipimpin oleh para biksu budha, aktivis partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Mahasiswa, dan sekitar 100.000 masyarakat sipil ikut bergabung dalam aksi ini. Aksi unjuk rasa tahun 2007 ini merupakan yang terbesar dalam 19 tahun terakhir, setelah unjuk rasa pro-demokrasi tahun 1988 lalu.¹

Panjangnya pawai unjuk rasa ini hampir mencapai 10 km, beberapa laporan berita menamakan bahwa aksi protes ini sebagai *Revolusi Saffron*. Aksi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah junta militer yang secara sepihak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar dua kali lipat, dari 1500 kyat menjadi 3000 kyat per-galon (2,5 liter) pada 15 Agustus 2007. Harga barang yang terus naik, membuat kondisi perekonomian rakyat Myanmar semakin sulit, sedangkan pendapatan masyarakat hanya berkisar 30.000 kyat per-bulan.

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi sebanyak dua kali terhadap pemerintah junta militer Myanmar, pada tahun 1997 dan 2003 lalu. Kebijakan ini diambil oleh AS, sebagai desakan agar terciptanya sistem pemerintahan yang demokrasi di Myanmar.² Pada 18 Oktober 2007, Presiden Bush mengeluarkan Executive Order 13448 (E.O. 13448) terhadap Myanmar, yaitu memperluas lingkup status darurat nasional Myanmar yang telah dinyatakan pada E.O. 13047 dan memblokir semua properti dan kepentingan dalam properti atas orang-orang yang terlibat pada pemerintah junta militer. Presiden Bush menyatakan bahwa KTT ASEAN-AS yang direncanakan dilaksanakan tahun 2008 tidak akan terjadi karena status Myanmar.³

Gambaran Umum Hubungan Bilateral AS-Myanmar

Myanmar terdiri dari masyarakat multikultural, multiras dan multi-agama. Secara resmi, ada 135 kelompok ras nasional yang terdiri dari delapan etnis. Menurut Sensus 1983, etnis *Bamar* merupakan 69% dari penduduk Myanmar dan etnis *Shan* adalah kelompok etnis minoritas terbesar dengan 8,5%. Proporsi untuk etnis lain ialah: *Kayin*, 6,2%, *Rakhine* 4,5%, *Mon* 2,4%, *Chin* 2,2%, *Kachin* 1,4%, *Kayah* 0,4%, dan lain-lain 5,4%. Dalam hal dominasi agama, Budha terdiri dari 89,4%, sedangkan Kristen yang terbesar kedua dengan 4,9%, Muslim 3,9%, Hindu 0,5%, dan penganut animisme, dll 1,3%. Meskipun ada kebebasan

¹ *Demonstrasi Myanmar Terbesar Setelah 20 Tahun*, 25 September 2007, <<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=1&dn=20070925021858>>, [diakses 23 April 2013].

² *From NPR reports and The Associated Press, Bush Announces Sanctions on Myanmar*, <<http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14685431>>, [diakses 23 April 2013].

³ Tom lantos block burmese jade (junta's anti-democratic efforts) act Of 2008. Public law 110–286—july 29, 2008.

beragama di Myanmar, Budhisme tampaknya telah menikmati dukungan pribadi yang cukup besar dari kepemimpinan junta militer.⁴

Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) memanfaatkan Myanmar sebagai basis bagi operasi melawan pasukan Jepang di China dan Asia Tenggara. Setelah perang, Myanmar menjadi bangsa merdeka yang dipimpin oleh pemerintahan sipil. Myanmar menjadi anggota PBB pada tahun 1948, merupakan anggota pendiri dari Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT), serta bergabung dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 1952 dengan dukungan penuh dari AS.

Myanmar juga diberikan status *Most Favored Nation* (MFN) oleh AS, dan mendukung penyediaan bantuan pembangunan oleh lembaga keuangan internasional. Kedekatan hubungan militer kedua negara dapat dilihat dari program kerjasama *international military and education training* (IMET) sampai tahun 1988. Mulai tahun 1987, protes rakyat terhadap pemerintah junta militer militer bermunculan diseluruh Myanmar dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 1988.

Hubungan bilateral antara AS dengan Myanmar memburuk setelah kudeta militer dan penindasan terhadap demonstran pro-demokrasi tahun 1988. AS menurunkan tingkat representasi di Myanmar setelah tindakan keras pemerintah junta militer terhadap oposisi demokratik pada tahun 1988. AS mengutuk tindakan pembunuhan dan penangkapan para demonstran, serta mendukung kembalinya demokrasi dengan mengangkat isu HAM dan rekonsiliasi di Myanmar.

Pada pemilu tahun 1990, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menerima 59,9% dari suara sah dan memenangkan 382 kursi, sementara partai politik pro-pemerintah SLORC, menerima 21,2% suara memenangkan 10 kursi. Melihat kondisi pemilu ini, pemerintah junta militer membatalkan hasil pemilu dan menahan Aung San Suu Kyi. Kejadian ini membuat hubungan bilateral AS-Myanmar menjadi semakin buruk, pemerintah junta militer dinilai otoriter dan melakukan pelanggaran HAM atas kegagalan untuk menghormati hasil pemilihan umum parlemen pada tahun 1990.⁵

Pada 20 Mei 1997, Presiden Bill Clinton menjatuhkan embargo ekonomi dengan melarang investasi oleh orang AS ke Myanmar. Sanksi ini dijatuhkan berkenaan dengan belum terealisasinya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan kasus pelanggaran HAM yang masih terus terjadi di Myanmar. Pada tahun 2003, pemerintah junta militer melakukan serangan terhadap konvoi partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi di Depayin.

Pada 28 Juli 2003, Presiden George W. Bush mengeluarkan Executive Order (EO) yang memberlakukan sanksi terhadap Myanmar sesuai dengan *Burmese Freedom and Democracy Act* (BFDA). Executive Order 13310, berisi

⁴ Tin Maung Maung Than. *Myanmar: The Dilemma of Stalled Reforms*. Fellow ISEAS, September 2000 No. 10. hal. 2.

⁵ Tin Maung, *op. cit.*, hal. 11-13.

draft pelarangan impor produk dari Myanmar dan ekspor jasa keuangan ke Myanmar, serta membekukan aset SPDC dan tiga lembaga keuangan perdagangan luar negeri Myanmar. Pilihan untuk mengukur kebijakan dalam pelaksanaan sanksi ini tergantung pada sifat dan perubahan yang di inginkan.

Represi berikutnya, terjadi atas tindakan keras junta militer terhadap demonstran damai pada bulan September 2007 membuat hubungan bilateral menjadi semakin tegang. Untuk melancarkan isolasi terhadap Myanmar, maka AS memilih untuk menambah penjatuhan sanksi. Pada 27 September 2007, Departemen Keuangan AS menunjuk 25 pejabat senior pemerintah Myanmar sebagai subjek atas pem-blokiran aset dalam Executive Order 13310. Pada 18 Oktober 2007, Presiden George W. Bush mengumumkan Executive Order (EO 13448), dengan memperluas kewenangan untuk memblokir aset individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan korupsi publik.⁶

Amerika Serikat Menjatuhkan Embargo Ekonomi Terhadap Myanmar Tahun 2007

1. Pelarangan investasi di Myanmar bagi warga negara AS.

Pelarangan investasi di Myanmar bagi warga negara AS ini, merupakan pengulangan sanksi yang sebelumnya telah tercantum dalam draft embargo ekonomi pertama AS terhadap Myanmar pada tahun 1997. Dalam *Presidential Documents* pada 20 Mei 1997, Presiden AS Bill Clinton mengeluarkan Executive Order (EO) 13047 mengenai pelarangan investasi baru di Myanmar. Draft ini telah disahkan dalam perundang-undangan negara pasal 570 (b). Sejumlah kriteria digunakan untuk menentukan apakah layak atau tidak aktivitas investasi tersebut, meliputi kejelasan ruang lingkup perjanjian, dan sejauh mana kekuatan hukum perjanjian tersebut.

Investasi baru di definisikan sebagai kontrak warga negara AS dengan pemerintah junta militer atau badan non-pemerintah yang meliputi pengembangan sumber daya ekonomi (alam, pertanian, komersial, keuangan, industri, dan sumber daya manusia) yang terletak di Myanmar. Larangan investasi tersebut termasuk membeli saham kepemilikan dalam suatu proyek dan memasuki perjanjian yang menyediakan partisipasi dalam bentuk royalti, laba, atau keuntungan dari pengembangan sumber daya ekonomi di Myanmar. Draft ini juga melarang warga negara AS masuk ke dalam kontrak yang memberikan pengawasan umum, dan jaminan kontrak kinerja seseorang untuk pengembangan sumber daya ekonomi Myanmar.

2. Pelarangan impor produk dari Myanmar ke AS.

⁶ Presidential Documents. *Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Burma*, Executive Order 13448 of October 18, 2007.

Menurut Undang-Undang *Burmese Freedom and Democracy Act* (BFDA) pada tahun 2003, setiap barang yang diimpor dari Myanmar dilarang memasuki AS. Undang-Undang ini juga mengkhususkan pelarangan impor bagi barang tambang berupa batu rubi dan jadeite yang berasal dari Myanmar.⁷

Berdasarkan data dari *World Trade Organisation (WTO)* yang ditulis oleh *U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade Division*, barang-barang impor dari Myanmar ke AS telah di putus sejak tahun 2004. Selama periode tahun 2004-2012, praktis tidak ada produk impor dari Myanmar yang masuk ke wilayah AS. Pada tahun 2005 dan 2009, tercatat impor produk barang dari Myanmar ke AS hanya sebesar US\$ 0,1 juta.⁸

Sanksi ini berjalan efektif bagi pemerintah AS, melihat data statistik impor produk tersebut. Pemerintah AS melaksanakan embargo secara tegas, dengan memutus semua kegiatan impor produk Myanmar mulai tahun 2004. Sedangkan bagi Myanmar, sanksi ini tidak terlalu mengganggu kestabilan dalam negeri. Hal ini dikarenakan China memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Myanmar menghadapi ekonomi AS.

3. Memblokir semua properti pejabat junta militer yang berada di AS.

Warga negara AS dilarang untuk melakukan transaksi dan kegiatan penjualan properti dengan pejabat junta militer Myanmar, seperti yang telah disetujui pemerintah AS atas sanksi pemblokiran aset. Entitas atau setiap orang yang dikendalikan atau dikuasai oleh para pejabat junta militer, juga berada dibawah sanksi hukum AS. Secara khusus, sanksi ini berlaku bagi setiap orang yang memiliki saham kurang dari lima puluh persen atas aset properti milik pejabat junta militer Myanmar tersebut.

Fakta menunjukkan bahwa setiap kegiatan transaksi dengan pemerintah dan pejabat junta militer Myanmar, dalam kepemilikan aset properti di AS harus dipertimbangkan dengan cermat. Perusahaan-perusahaan properti AS harus melakukan pengecekan individu dan entitas, untuk mengetahui dengan siapa mereka akan melakukan bisnis, serta memastikan mereka tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh pejabat junta militer. Sistem ini merupakan upaya taktis pemerintah AS untuk menekan pemerintah Myanmar, agar mau melepaskan kediktatoran kekuasaan.

⁷ Presidential Documents. *Blocking Property of the Government of Burma and Prohibiting Certain Transactions*, Executive Order 13310 of July 28, 2003.

⁸ Bureau of Economic Analysis, *U.S. Direct Investment Abroad: Balance of Payments and Direct Investment Position Data*, <<http://www.bea.gov/international/di1usdbal.htm>>, [diakses 30 Agustus 2013].

Departemen Keuangan AS memperluas cakupan untuk menunjuk sanksi terhadap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, korupsi publik, dan mereka yang menyediakan dukungan keuangan kepada pejabat junta militer. Departemen Luar Negeri AS memberikan predikat Myanmar sebagai “negara produsen utama obat terlarang”.⁹ Selanjutnya, Myanmar dilarang untuk menerima beberapa bantuan luar negeri AS untuk wilayah Asia Tenggara.

Kepentingan Amerika Serikat Untuk Meningkatkan Ekonomi Dan Peran Dikawasan Asia Tenggara

1. Mendoktrin nilai liberalisme dikawasan Asia Tenggara.

Dalam upaya untuk meningkatkan peran dikawasan Asia Tenggara, mempromosikan nilai liberalisme adalah suatu langkah strategis yang harus dilakukan AS. Untuk melakukan hal tersebut, AS masih akan menghadapi berbagai masalah perbedaan dalam sistem politik, ekonomi, sosiologis, budaya dan sejarah. Hal ini menjadi lebih kompleks dalam hubungan internasional menyangkut pengaturan lintas batas. Liberalisme politik (demokrasi liberal) dianggap telah membuat kemajuan besar diseluruh bagian dunia, kecenderungan umum ini juga berlaku untuk kawasan Asia Tenggara.

Laporan tahunan *Canadian Fraser Institute*, sebuah organisasi riset ekonomi independen yang telah menjadi acuan penting berkaitan dengan “kebebasan ekonomi dunia”, menempatkan dua negara Asia memimpin dalam peringkat teratas internasional. Mereka adalah HongKong dan Singapura, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Swiss dan Irlandia. Peringkat negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara adalah sebagai berikut: Jepang (24), Taiwan (30), Filipina dan Korea Selatan (38), Malaysia (51), Thailand (56), Indonesia (77) dan China (101).¹⁰

2. Mempromosikan sistem pemerintahan demokrasi.

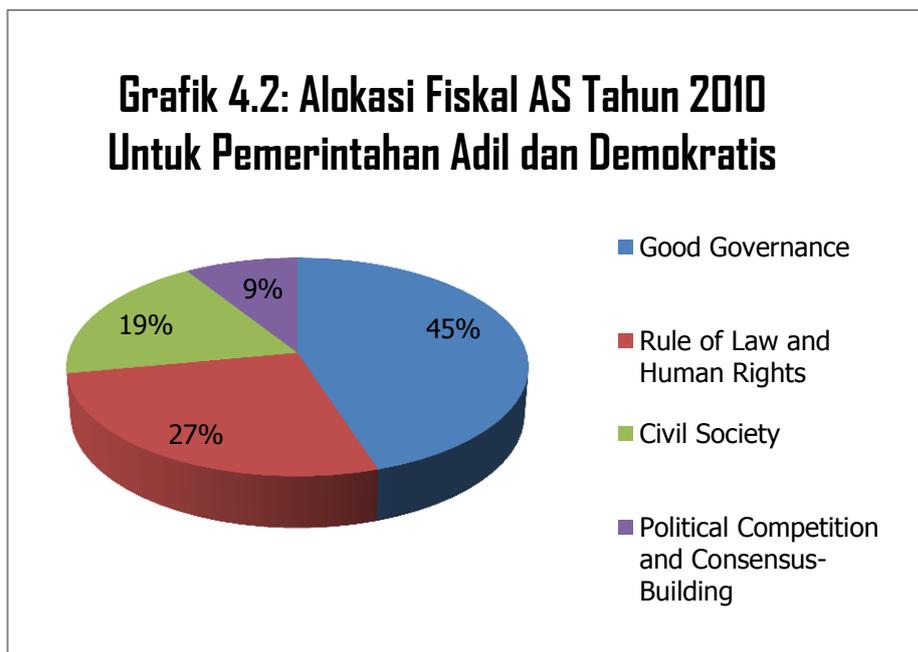
AS merupakan negara yang mendukung perluasan sistem pemerintahan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam agenda hubungan internasionalnya. Keberhasilan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi di kancah internasional, menumbuhkan lingkungan yang mendukung kepentingan nasional AS. Sistem politik demokrasi yang dianggap dapat melindungi hak-hak universal, pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan aman. AS sebagai negara

⁹ Robert, *op. cit.*, hal. 251

¹⁰ *Friedrich Naumann Foundation Philippines, Challenges of Promoting Liberalism in Asia*, <<http://www.fnf.org.ph/liberallibrary/challenges-promoting-liberalism.htm>>, [diakses 02 September 2013].

demokrasi liberal dapat lebih efektif untuk mengatasi masalah internasional, ketika bekerja sama dengan pemerintah yang demokrasi.

Kawasan Asia Tenggara terdiri dari sepuluh negara, mereka adalah anggota ASEAN yang memiliki populasi lebih dari 608 juta jiwa. Semua negara-negara dikawasan Asia Tenggara memiliki kebudayaan, sejarah, serta bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Brunei adalah negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Vietnam dan Laos adalah negara dengan sistem pemerintahan partai tunggal, dan Myanmar diperintah oleh junta militer. Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand merupakan negara yang telah mengalami reformasi politik menjadi demokrasi.¹¹



Sumber: <http://www.freedomhouse.org/article/investing-freedom-democracy-support-us-budget>

Dengan dana fiskal pada tahun 2010 sebesar US\$ 3,40 Milyar, setiap bantuan luar negeri di distribusikan oleh AS kepada negara-negara yang ingin menegakkan pemerintahan yang adil dan demokratis. Alokasi dana untuk kategori *Tata Kelola pemerintah yang Baik (Good Governance)* sebesar 45%, alokasi dana untuk kategori *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rule of Law and Human Rights)* sebesar 27%. Sedangkan alokasi dana untuk kategori *Masyarakat Sipil (Civil Society)* sebesar 19%, dan alokasi dana untuk kategori *Persaingan Politik dan*

¹¹ Norbert von Hofmann. 2009. *Social Democratic Parties in Southeast Asia-Chances and Limits*, Friedrich-Ebert-Stiftung: Singapore. hal. 3.

Pembangunan Konsensus (Political Competition and Consensus-Building) sebesar 9%.¹²

3. Mengangkat isu pelanggaran HAM.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adalah batu fondasi dalam pembentukan AS lebih dari 200 tahun yang lalu. Sejak itu, tujuan utama dari kebijakan luar negeri AS ialah untuk mempromosikan kebebasan HAM, sebagaimana yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights*. AS memahami bahwa keberadaan HAM membantu mengamankan perdamaian, menghalangi agresi, mempromosikan supremasi hukum, memerangi kejahatan dan korupsi, memperkuat demokrasi, serta mencegah krisis kemanusiaan.

Beberapa contoh kasus dapat menggambarkan bagaimana hubungan antara HAM dan agresi internasional akan mengubah kebijakan luar negeri AS. Kasus Iran dan Liberia adalah beberapa contoh kondisi kekhawatiran AS, tetapi telah diperlakukan dengan sangat berbeda dan sengit. Rusia yang pada kenyataannya bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM berat di Chechnya, malah menjadi mitra penting AS pada sejumlah isu global. Tujuan dari perbandingan ini bukan untuk menggambarkan kebijakan secara komprehensif, melainkan untuk menunjukkan bagaimana hubungan strategis antara HAM dan kepentingan nasional dapat mengubah kebijakan luar negeri AS.¹³

Kawasan Asia Tenggara tidak luput dari pantauan AS dalam perwujudan kebebasan HAM dan kasus pelanggaran HAM. Negara yang masih diperintah oleh pemerintahan otoriter, biasanya memiliki riwayat kasus pelanggaran HAM. Salah satu negara dikawasan Asia Tenggara yang masuk kategori kasus pelanggaran HAM berat, menurut *Human Rights Watch* (HRW) ialah Myanmar. Myanmar berada posisi teratas dalam kasus pelanggaran HAM dikawasan Asia Tenggara.

Kesimpulan

Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang transparan dan mendengarkan suara rakyat, menggantikan sistem pemerintahan konvensional seperti aristokrasi dan otoriter. Sistem pemerintahan aristokrasi dan otoriter hanya akan melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat, untuk itu demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang di nilai paling ideal. Mengubah negara aristokrat dan

¹² *Manager of Congressional Affairs. Investing in Freedom: Analyzing the FY 2012 Democracy Support in the US Budget*, by Sarah Trister, <<http://www.freedomhouse.org/article/investing-freedom-democracy-support-us-budget>> [diakses 24 September 2013]. hal. 3-5.

¹³ William W. Burke-White. 2004. *Human Rights and National Security: The Strategic Correlation*. Harvard: United States. hal. 275.

otoriter menjadi demokrasi-liberal merupakan tujuan utama penjalinan kerjasama bilateral maupun regional yang dilakukan AS.

Dengan meningkatkan perannya dalam setiap agenda kerjasama luar negeri, akan memudahkan AS mendoktrin nilai demokrasi-liberal terhadap negara lain. Untuk memudahkan masuknya nilai demokrasi ke dalam suatu negara, AS mengangkat isu mengenai pentingnya kebebasan Hak Asasi Manusia melalui forum internasional. Dengan menggunakan *track record* lembaga survei internasional mengenai kasus pelanggaran HAM di setiap negara, AS berusaha menekan negara tersebut untuk segera melakukan reformasi demokrasi.

Hak Asasi Manusia merupakan senjata baru AS untuk mendesak tercapainya sistem pemerintahan demokrasi-liberal di dunia. Liberalisme, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia adalah agenda utama strategi internasional AS dalam rangka memenuhi keamanan nasional. Apabila sebuah negara belum dan tidak mau melakukan perubahan pada ketiga doktrin agenda tersebut, maka akan berpeluang besar untuk dijatuhkan embargo (sanksi) oleh AS.

Daftar Pustaka

- Burchill, Scott and Andrew Linklater. 1996. *Theories of International Relations*. New York: ST Martin's Press, INC.
- Dougherty, James E, and Robert L. Pfaltzgraff Jr. 2001. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*, 5th ed. New York: Longman.
- Doyle, Michael W. *Liberalism and Foreign Policy*, dalam Steve Smith, Amelia Hadfield dan Tim Dunne, eds., *Foreign Policy: Theory, Actors, Cases*. (Oxford University Press, 2008).
- Gray, John. 2003. *Concept in Social Thought: Liberalism Second Edition*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Mas'ood, Muchtar. 2003. "Konsep" dalam *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1990. *Disiplin dan Metodologi*. LP3ES: Jakarta.
- Moravcsik, Andrew. 2001. *Liberal International Relations Theory: A Social Scientific Assessment*. Paper No. 01-02.
- Neack, Laura. 2008. *The New Foreign Policy: Power seeking in a globalized era*. UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Plano, Jack C., & Roy Olton. 1969. *The International Relation Dictionary*. Western Michigan University: Holt Rinehart Winstone, Inc.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.

Snyder, Richard C., H. W. Bruck, and Burton Sapin. 1962. "Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics. New York: Macmillan.

Zafirovski, Milan (2007). *Liberal Modernity and Its Adversaries: Freedom, Liberalism and Anti-Liberalism in the 21st Century*. BRILL.